Nomor : 5491/1/HK.00.03/12/2025
Tanggal : 29 Desember 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI UNTUK PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan hibah langsung dalam negeri yang transparan dan akuntabel, perlu mengatur pelaksanaan hibah langsung dalam negeri; b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah yang mengatur mengenai pelaksanaan hibah langsung dalam negeri atas hasil pengumpulan sumbangan masyarakat dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;	Adanya regulasi pelaksanaan hibah langsung dalam negeri yang sudahdilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 3; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas IX Bab dan 35 Pasal meliputi: a. ketentuan umum; b. sumber HLDN; c. HLDN dalam bentuk uang; d. tim pertimbangan HLDN; e. HLDN dalam bentuk barang; f. sanksi administratif; g. pemantauan dan evaluasi; dan h. ketentuan penutup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
				Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).		

Sekretaris Jenderal,



Robben Rico

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN